



Judul : Draft RUU Sisdiknas, 8 materi pokok jadi fokus utama
Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Draft RUU Sisdiknas 8 Materi Pokok Jadi Fokus Utama

BADAN Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selesai menyusun naskah akademik dan draft revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Draft tersebut diserahkan ke Panitia Kerja (Kerja) RUU Sisdiknas pada Rabu (1/10/2025) dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan.

Ketua Panja RUU Sisdiknas Hetifah Sjaifudian mengatakan, langkah selanjutnya adalah konsultasi publik, harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR, hingga dibawa ke Rapat Paripurna untuk disetujui sebagai RUU Inisiatif DPR. "Ada delapan materi pokok yang masuk ke dalam RUU Sisdiknas yang baru," sebut Hetifah dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Pertama, kata Hetifah perbaikan tata kelola pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, memasukkan unsur perencanaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang terpadu melalui Rencana Induk Pendidikan Nasional.

Ketiga, rencana penyempurnaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang mengakomodasi prinsip multi-entry dan multi-exit, rekognisi pembelajaran lampau, serta kredensial mikro. Melalui skema ini, pendidikan akan dibuat lebih fleksibel, mengakui pengalaman pendidikan sebelumnya, dan memperoleh sertifikasi keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Keempat, perubahan ketentuan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Artinya, dengan adanya perubahan ini, maka Pemerintah wajib membiayai, memfasilitasi sarana-prasarana, menyediakan tenaga pendidik

yang memadai, serta menjamin ketersediaan bangku sekolah hingga tingkat menengah atas bagi seluruh anak Indonesia.

Kelima, penyempurnaan pendanaan pendidikan dan tata kelola penggunaan anggaran pendidikan. Keenam, penyempurnaan ketentuan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat.

"Regulasi baru ini akan memperjelas hak, kewajiban, serta sistem pembinaan dan pengembangan profesi guru maupun tenaga kependidikan agar lebih profesional dan sejahtera," kata politikus Golkar ini.

Ketujuh, akan mengakui posisi pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Terakhir, akan mengakomodir terkait dengan penguatan standar nasional pendidikan, meliputi kurikulum, evaluasi, penjaminan mutu, serta data pendidikan.

Terkait isu penghapusan tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas, Hetifah memastikan informasi itu tidak benar. Kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas. "Draft revisi RUU Sisdiknas yang tengah disusun belum pernah dipublikasikan kepada pihak luar," tandasnya.

Hetifah melanjutkan, pengaturan gaji dan tunjangan guru yang sebelumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen akan diperkuat kembali dalam RUU Sisdiknas.

Dia menjelaskan dalam rancangan Pasal 135 RUU Sisdiknas, hak guru diatur mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta masalah tambahan seperti beasiswa, asuransi, penghargaan, hingga kemudahan pendidikan bagi anak guru. ■ TIF